



2026

Eselon III

Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur

PERJANJIAN KINERJA

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
KELAS II NUSA TENGGARA TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Nusa Tenggara Timur Tahun 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2026

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Engelbertus Langi, A.Md.LLASDP, S.ST(TD)	Penelaah Teknis Kebijakan	05/01/2026	
2.	Diperiksa	Yaan Sem Appah, S.ST (TD), M.M.	Kasubbag Tata Usaha	05/01/2026	
3.	Disetujui	Yaan Sem Appah, S.ST (TD), M.M.	Kasubbag Tata Usaha	05/01/2026	
4.	Disetujui	Marta Anggoro, S.ST., M.M.Tr.	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	05/01/2026	
5.	Disetujui	Jermias Meda, SE., M.M.	Plt. Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	05/01/2026	
6.	Disetujui	Engelberd Leonardo Mailau, S.ST., M.Tr.M	Plt. Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	05/01/2026	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robert Napoleon Isak Tail, S.SI.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 6 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1



Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Nusa Tenggara Timur

Robert Napoleon Isak Tail, S.SI.T., M.M.
NIP. 19750617 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KODE IKK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK.1.1.2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Layanan	36
SK.1.1.3	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi wilayah KSN/KI	IKK1.1.3A	Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	Layanan	1
SK.1.2	Meningkatnya Konektivitas transportasi angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	IKK1.2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	Layanan	9
SK2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK2.1.2	Jumlah terminal Barang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
		IKK2.1.3	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	2
		IKK2.1.4	Jumlah Operasional Layanan Terminal Barang sesuai SPM	Unit	1
		IKK2.1. 7	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	2

KODE IKK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK2.2.1	Jumlah Pelabuhan ASDP yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
SK3.1	Meningkatkan keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang	Kegiatan	2
		IKK3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang	Kegiatan	1
SK3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	13
SK3.3	Menurunkan Jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	Unit	2984
		IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	LRK	3
SK3.4	Meningkatnya Kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 3.4.1	Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Kegiatan	1
		IKK 3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Kegiatan	1
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi	Kegiatan	30
		IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	37
		IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	98
		IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	6
		IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	%	100

KODE IKK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	12
		IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan	1
		IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
		IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4

Kegiatan

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	77.396.710.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	6.319.698.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	11.153.961.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.423.030.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.262.072.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	14.572.160.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1

Kupang, 6 Januari 2026
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Nusa Tenggara Timur


Robert Napoleon Isak Tail, S.Si.T., M.M.
NIP. 19750617 199703 1 007



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**